

Faktor Pendorong Partisipasi Pengguna Internet dalam Petisi Digital

Dyah Hapsari Ekonugraheni ^{1,*}, , Retna Mahriani ², , dan Yusnaini ¹, 

¹ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Ogan Ilir, 30662, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia

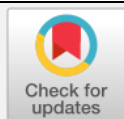
² Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Ogan Ilir, 30662, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia

* Penulis Korespondensi: dyahhapsari@fisip.unsri.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Ekonugraheni, D. H., Mahriani, R., & Yusnaini, Y. (2023). Factors Contributing to Internet Users' Participation in Digital Petitions. *Society*, 11(2), 359-376.

DOI: [10.33019/society.v11i2.387](https://doi.org/10.33019/society.v11i2.387)

Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

Dikirim: 8 Juni, 2022;

Diterima: 12 Desember, 2023;

Dipublikasi: 19 Desember, 2023;

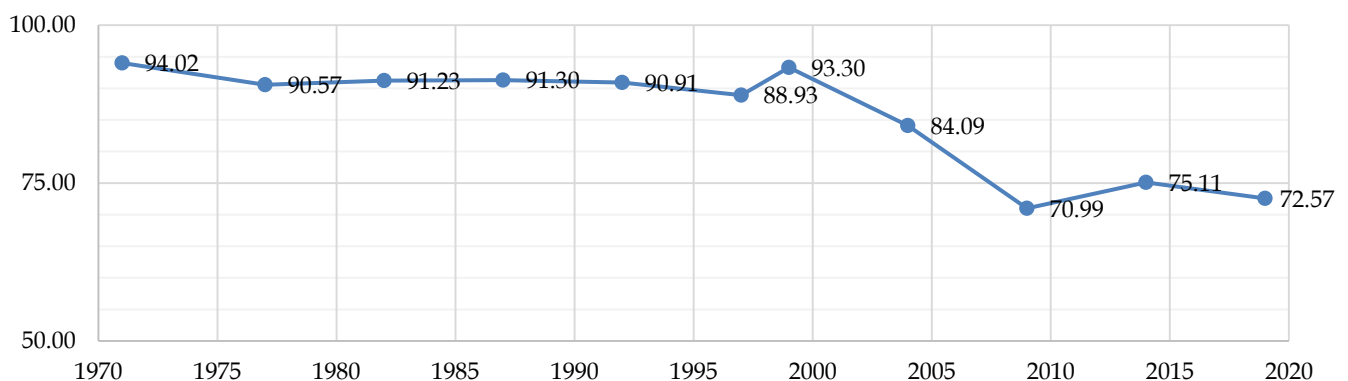
ABSTRAK

Kajian ini mencoba menjawab mengapa warga negara Republik Indonesia tetap mengikuti petisi digital meski pemerintah belum mengesahkan mekanisme tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan data mentah dari World Value Survey (WVS) VII yang melibatkan 3.000 responden asal Indonesia yang berusia delapan belas tahun dan dipilih secara acak. Teknik regresi logistik menguji pengaruh empat belas variabel independen terhadap variabel dependen (partisipasi pengguna internet dalam petisi digital/Y). Model regresi logistik akhir memuat tujuh variabel independen yang mampu menjelaskan Y secara signifikan sebesar 4,52%, $X^2(7) = 169,60$, $p < 0,01$. Model terakhir menghasilkan karakteristik responden yang dapat berpartisipasi dalam petisi digital: generasi muda, tidak beragama, berideologi liberalisme, berjenis kelamin laki-laki, berpendidikan lebih dari atau setara SMA, tidak percaya pada organisasi pemerintah, dan belum menikah. Kajian ini merekomendasikan agar pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan petisi digital meningkatkan religiusitas warga, meningkatkan kuantitas, akses, dan kualitas jenjang pendidikan pendidikan ideologi, serta menjaga kepercayaan warga terhadap organisasi pemerintah. Peneliti juga mendorong lembaga legislatif di pusat dan daerah untuk secara formal mengadopsi mekanisme petisi digital sebagai saluran resmi bagi warga untuk menyampaikan aspirasi politiknya.

Kata Kunci: Indonesia; Partisipasi Elektronik; Petisi Digital; Partisipasi Politik; World Values Survey

1. Pendahuluan

Salah satu permasalahan global yang menjadi perhatian banyak negara saat ini adalah penguatan dan perluasan partisipasi warga negara dalam proses politik. Di Indonesia, partisipasi politik warga negara, khususnya partisipasi pemilu, mengalami fluktuasi. Seperti terlihat pada Gambar 1, dalam kurun waktu setengah abad (1970 – 2020), partisipasi elektoral warga negara dalam pemilu legislatif berkisar antara 94% hingga 70%. Berdasarkan situasi tersebut, tidak mengherankan jika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukkan isu partisipasi politik sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya Tujuan 16: perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Dua indikator Tujuan 16 mewakili isu partisipasi politik: (a) memastikan proses pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di semua tingkat pengambilan keputusan (indikator 16.7); (b) memperluas dan memperkuat partisipasi negara-negara berkembang dalam lembaga tata kelola global (indikator 16.8) (United Nations, 2015).



Sumber: (International IDEA, n.d.)

Berdasarkan hasil World Value Survey (WVS) VII, hanya 76 (4,52%) orang yang pernah berpartisipasi dalam petisi digital, 333 (19,80%) menyatakan boleh (ikut atau tidak berpartisipasi) dalam petisi digital, dan 1.273 (75,68 orang) %) orang mengatakan tidak akan berpartisipasi. Responden WVS VII di Indonesia yang mengkonsumsi berita dan informasi politik melalui internet mencapai 677 (40,39%) orang, kemungkinan mengkonsumsi sebanyak 388 (23,15%) orang, dan tidak akan mengkonsumsi sebanyak 611 (36,46%) orang. Data ini menegaskan bahwa mereka yang terpapar berita dan informasi politik online belum tentu berpartisipasi dalam petisi digital. Fenomena ini tentu saja bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara pengetahuan dan partisipasi politik, yang menegaskan adanya hubungan positif yang kuat antara variabel-variabel tersebut (de Vreese & Boomgaarden, 2006; Dimitrova et al., 2014; Kaufhold et al., 2010). Idealnya, semakin banyak pengguna internet yang terpapar informasi politik, semakin tinggi peluang mereka untuk berpartisipasi dalam petisi digital. Namun hal tersebut tidak terjadi di Indonesia. Penelitian ini dirancang untuk menguraikan fenomena tersebut. Diharapkan dapat berkontribusi pada perdebatan ilmiah global mengenai petisi digital yang mulai mendapat perhatian para peneliti.

Sejauh ini, pengetahuan empiris mengenai petisi digital cukup beragam. Mulai dari pengaruh platform media digital terhadap partisipasi pengguna internet dalam petisi digital (Harrison et al., 2021), faktor yang mempengaruhi partisipasi warga dalam petisi elektronik (Sheppard, 2015), popularitas petisi elektronik (Clark & Lomax, 2020; Hagen et al., 2016), karakteristik e-petition yang kuat dan baik (Bochel & Bochel, 2017; S. Wright, 2012), kinerja e-petition (S. Wright, 2015, 2016), hingga dampak petisi elektronik tentang proses pembuatan

kebijakan (Ranchordás, 2017). Yang lain menganalisis petisi elektronik dengan pembelajaran mesin (Clark et al., 2018; Hagen, 2018; Suh et al., 2010; Wang & Zhong, 2020). Namun, sebagian besar penelitian ini berasal dari negara-negara dimana petisi telah secara formal diadopsi sebagai alat politik bagi warga negara untuk menyuarakan tuntutan politik kepada lembaga-lembaga politik formal. Tidak hanya itu, di Inggris, lembaga parlemen menyediakan platform khusus bagi warga negara yang ingin mengajukan petisi online (S. Wright, 2012). Namun sejauh pengetahuan peneliti, belum ada peneliti yang mencoba menguraikan secara bersama-sama pengaruh variabel jenis kelamin, umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, status pekerjaan, kelas sosial, agama, lokasi tempat tinggal, kepercayaan terhadap masyarakat, kepercayaan terhadap institusi pemerintah, kepercayaan terhadap parlemen, religiusitas, tingkat kebahagiaan, dan kecenderungan ideologis, baik sebagian maupun bersama-sama, terhadap partisipasi warga dalam menandatangani petisi digital.

2. Kajian Pustaka

2.1. Petisi Digital

Secara sederhana, petisi adalah suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh banyak orang dan berisi permintaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk melakukan tindakan tertentu atau mengubah sesuatu (Anonymous, 2021a). Sebelum berkembangnya internet, petisi dilakukan secara *offline*. Para pembuat petisi akan melakukan kampanye besar-besaran agar petisinya ditandatangani oleh banyak orang. Apabila sejumlah warga mendukung permohonan, maka berkas permohonan diserahkan kepada pihak terkait. Secara umum petisi selalu ditujukan kepada lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan perusahaan swasta yang mempunyai kewenangan tertentu.

Di era internet seperti saat ini, petisi sudah berbentuk digital. Petisi digital berbeda dengan petisi konvensional (*non-digital*) dalam beberapa hal: (a) partisipasi warga dalam petisi digital terjadi dalam situasi online (*clicktivism*); (b) *clicktivism* merupakan tindakan yang bersifat spontan meskipun pada tingkat tertentu terdapat celah yang harus direnungkan oleh warga sebelum mengisi petisi digital; (c) *clicktivism* tidak disertai dengan komitmen jangka panjang; (d) *clicktivism* tidak memerlukan keterampilan dan pengetahuan khusus. Warga yang ingin berpartisipasi hanya perlu memiliki kemampuan berinteraksi di dunia digital; (e) *clicktivism* lebih mudah ditiru dan diperbanyak sehingga dapat menjangkau populasi yang lebih luas (Halupka, 2014).

Britania Raya (UK) menjadi negara maju pertama yang mengajukan petisi secara digital sebagai saluran bagi warganya untuk menyuarakan aspirasi publik. Di Britania Raya, jika petisi digital yang diprakarsai masyarakat berhasil: (a) didukung oleh 10.000 tanda tangan, pemerintah (eksekutif) akan menanggapi petisi digital tersebut; (b) didukung 100.000 tanda tangan, maka tuntutan petisi digital akan diperdebatkan di parlemen Inggris. Faktanya, parlemen Inggris telah menyiapkan aplikasi khusus bagi warga negara yang ingin memulai petisi digital (Anonymous, 2021b). Pelembagaan petisi digital, seperti yang dilakukan di Inggris, setidaknya memiliki tiga fungsi dasar: (a) menyediakan saluran khusus bagi warga negara yang ingin berkomunikasi dengan lembaga perwakilan (legislatif/parlemen) dan lembaga pemerintah (eksekutif); (b) menginformasikan perkembangan kebijakan dan pengawasan eksekutif; dan (c) mempengaruhi perubahan kebijakan (Hough, 2012). Namun sejauh mana sistem petisi digital dapat menjalankan ketiga fungsi tersebut secara bersamaan atau terpisah merupakan persoalan empiris yang perlu diungkap melalui penelitian empiris.

Beb(Ranchordás, 2017)erapa peneliti melihat fenomena petisi digital dari sudut pandang berbeda. Dolata & Schrape, misalnya, menganggap praktik petisi digital sebagai salah satu jenis

perilaku kolektif di dunia maya (Dolata & Schrape, 2016). Karena petisi digital bersifat spontan, tanpa kontemplasi, tanpa komitmen jangka panjang, maka partisipasi warga dalam petisi digital, mengutip George & Leidner, ibarat perilaku penonton/pengamat yang sibuk berteriak dengan berbagai ekspresi verbal dan visual namun tidak mampu mengubah situasi (George & Leidner, 2019). Namun tidak semua peneliti setuju dengan argumen George & Leidner. Beberapa peneliti menemukan bahwa penggunaan teknologi telah meningkatkan kualitas dan kuantitas keterlibatan warga negara dalam proses politik dan cara kerja lembaga-lembaga politik (Dai & Norton, 2007; Ranchordás, 2017). Selain itu, efektivitas dan kemampuan petisi digital dalam mengubah situasi yang diinginkan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kualitas semantik, linguistik, isi petisi (Bochel & Bochel, 2017; Clark & Lomax, 2020), emosi positif (Elnoshokaty et al., 2016), transparansi, efisiensi dan transferabilitas petisi (S. Wright, 2012), dan kepemimpinan dalam gerakan petisi (Ranchordás, 2017).

Perdebatan para peneliti tidak hanya mengenai kinerja dan efektivitas petisi digital tetapi juga meluas ke isu prediktor partisipasi warga dalam menandatangani petisi digital. Sejauh ini, beberapa faktor yang telah diidentifikasi oleh para peneliti adalah akses dan kepemilikan sumber daya tradisional (misalnya tingkat pendidikan, melek huruf, status sosial) dan sumber daya online (misalnya akses terhadap internet, keterampilan menggunakan internet) (Anduiza et al., 2010), gender dan partisipasi dalam organisasi masyarakat (Sheppard, 2015), jenis jaringan sosial, keterlibatan pribadi dalam aktivisme sosial dan isu-isu yang diangkat, efikasi diri pribadi, efikasi teknologi personal, efikasi kelompok personal (Nekmat et al., 2015), kesadaran politik, kemandirian politik, dan rekrutmen jaringan (Oni et al., 2017), faktor teknologi, faktor politik, dan faktor organisasi (Susha & Grönlund, 2014), altruisme, kualitas argumen, relevansi pribadi (Ulo et al., 2019), dan faktor-faktor di tingkat makro, seperti pembangunan ekonomi dan pengalaman demokrasi (Stockemer, 2014).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mencoba menguraikan pengaruh beberapa variabel independen yang belum teridentifikasi oleh penelitian sebelumnya sebagai prediktor keterlibatan warga dalam petisi digital, seperti modal sosial, kelas sosial, religiusitas, tingkat kebahagiaan, ideologi, kecenderungan, dan variabel sosio-demografis (jenis kelamin, usia, status perkawinan, tingkat pendidikan, status pekerjaan, agama, dan lokasi tempat tinggal). Hubungan teoritis variabel-variabel independen ini terhadap petisi digital dijelaskan pada paragraf berikutnya.

2.2. Modal Sosial dan Partisipasi Petisi Digital

Modal sosial merupakan sumber daya komunal atau sumber daya sosial yang memfasilitasi berbagai tindakan individu dalam suatu struktur sosial tertentu (Inkeles, 2000). Modal sosial juga dapat diartikan sebagai jaringan sosial, norma sosial formal dan informal, serta kepercayaan, baik pada tingkat individu, kelompok, maupun komunitas, yang memungkinkan atau memfasilitasi kerja sama antar warga negara (Fukuyama, 1997; Putnam, 2002). Kepercayaan, sebagai proksi modal sosial, dapat dibagi menjadi empat konsepsi: kepercayaan kognitif vs non-kognitif dan kepercayaan diadik vs kepercayaan tertanam (Levi, 2015). Kepercayaan merupakan produk proses kognitif karena didasari oleh harapan rasional atau keyakinan rasional bahwa yang dipercaya akan dapat dipercaya. Konsepsi kepercayaan non-kognitif menganggap kepercayaan memiliki dasar moral, emosi, dan pribadi dan tidak dapat dengan mudah diatur oleh hubungan impersonal yang diwujudkan dalam birokrasi, pasar, atau hukum formal. Dalam konsepsi diadik, kepercayaan bersifat relasional dan tertanam pada tingkat individu. Terakhir, kepercayaan tertanam dalam jaringan sosial atau pengaturan

kelembagaan yang memungkinkan adanya ekspektasi atau ikatan sosial berdasarkan peran sosial, kategorisasi, dan aturan yang mempengaruhi orang lain.

Beberapa peneliti telah menunjukkan bagaimana modal sosial mempengaruhi proses penerapan partisipasi elektronik (Naranjo-Zolotov et al., 2019), dukungan pengguna media sosial terhadap isu-isu politik yang diperjuangkan oleh petisi digital (Panagiotopoulos et al., 2011), dan melahirkan jenis kewarganegaraan berbeda dengan kewarganegaraan di dunia nyata (de Zúñiga et al., 2017). Dalam konteks penelitian ini, peneliti berharap bahwa modal sosial (yang diukur dengan kepercayaan) akan memiliki hubungan positif dengan partisipasi warga dalam petisi digital. Pasalnya, petisi digital sangat bergantung pada jejaring sosial (salah satu elemen modal sosial) dan kepercayaan warga terhadap masyarakat yang terhubung dengan internet. Artinya semakin tinggi modal sosial yang dimiliki masyarakat, maka semakin tinggi pula kemungkinan warga berpartisipasi menandatangani petisi digital. Logika tersebut menjadi dasar peneliti untuk merumuskan hipotesis ke-1 (H1) sebagai berikut: kepercayaan terhadap masyarakat (X9) berpengaruh positif terhadap partisipasi warga dalam petisi digital.

Petisi digital merupakan salah satu bentuk ekspresi warga bahwa para politisi, baik legislatif maupun eksekutif, tidak tanggap terhadap berbagai permasalahan sosial politik yang berkembang di masyarakat. Elit politik sibuk dengan agenda politiknya sendiri dan mengabaikan agenda politik yang bersinggungan dengan kepentingan publik. Kehadiran petisi digital diharapkan dapat menarik perhatian elite politik terhadap permasalahan yang diangkat oleh penggerak dan penandatangan petisi digital. Secara implisit, proses ini – sampai batas tertentu – mengandung kepercayaan para pembuat petisi dan penandatangan terhadap lembaga pemerintah dan lembaga parlemen. Masyarakat yang terlibat dalam petisi digital yakin bahwa petisi mereka akan diproses dengan baik oleh pemerintah dan parlemen. Logika tersebut menjadi dasar peneliti untuk merumuskan hipotesis kedua dan ketiga dalam penelitian ini: (a) kepercayaan terhadap institusi pemerintah (X10) berhubungan positif dengan partisipasi warga dalam menandatangani petisi digital (H2); (c) kepercayaan terhadap parlemen (X11) berhubungan positif dengan penandatanganan petisi digital (H3).

2.3. Religiusitas dan Partisipasi Petisi Digital

Religiusitas (X12) dapat diartikan ketaatan seseorang terhadap ajaran agamanya. Ajaran agama tersebut meliputi keyakinan terhadap ajaran, perintah, larangan, ritual, dan lain sebagainya (Koenig et al., 2015). Para ilmuwan telah lama menganggap variabel religiusitas sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik (Emmenegger & Manow, 2014). Di Amerika Serikat, misalnya, religiusitas memainkan peran sentral dalam menentukan pilihan akhir pemilih perempuan pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 1996 (Greenberg, 2008). Di India, pemilih Muslim cenderung memilih kandidat Muslim hanya jika kandidat yang dipilih dianggap mempunyai potensi untuk menang (Heath et al., 2015). Dalam konteks petisi digital, kesamaan identitas agama menjadi pemicu solidaritas dan alasan penandatanganan petisi digital. Di Indonesia, agama bukan sekedar doktrin dan ritual belaka (Shadiqi et al., 2020).

Di sisi lain, agama merupakan kekuatan sosial politik yang berperan penting dalam setiap fase perjalanan politik Indonesia. Partisipasi politik berbagai warga, termasuk petisi digital, dapat dianggap sebagai bagian dari ijtihad politik yang sejalan dengan panggilan Tuhan. Oleh karena itu, peneliti berharap responden yang beragama memiliki hubungan positif yang signifikan dengan penandatanganan petisi digital (H4).

2.4. Kebahagiaan dan Partisipasi Petisi Digital

Kebahagiaan merupakan persepsi subjektif seseorang terhadap kualitas hidupnya sehari-hari. Persepsi ini sangat beragam karena lingkungan sosial, ekonomi, politik, pengetahuan, sudut pandang, pengalaman, dan kebutuhan yang berbeda mempengaruhinya. Misalnya, ketika seseorang berjalan sendirian di gurun pasir, air mineral mungkin lebih berharga daripada cincin emas. Perdebatan ilmiah mengenai kualitas hidup yang baik dan bahagia telah melahirkan berbagai aliran filsafat dalam teori etika, seperti hedonisme, egoisme, utilitarianisme, Kantianisme, dan sebagainya (Graham, 2004). Dalam konteks partisipasi politik, kebahagiaan dapat menjadi variabel terikat maupun variabel bebas. Kebahagiaan merupakan variabel dependen yang berkontribusi terhadap partisipasi politik warga terhadap kebahagiaan sebagai dimensi kualitas kesejahteraan psikologis (Chan et al., 2020). Kebahagiaan merupakan variabel independen yang menjadi prediktor kuat terhadap partisipasi pemilu dan hasil pemilu (Ward, 2020). Dalam penelitian ini tingkat kebahagiaan (X13) diposisikan sebagai variabel independen. Peneliti menduga responden yang bahagia memiliki peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam penandatanganan petisi digital (H5).

2.5. Ideologi dan Partisipasi Petisi Digital

Ideologi merupakan kumpulan gagasan, pemikiran, dan konsep yang diyakini kebenarannya dan menjadi pedoman berpikir dan bertindak bagi para pendukungnya. Ideologi merupakan sumber nilai bagi setiap tindakan politik individu, kelompok, atau lembaga politik modern. Dalam konteks partisipasi online, peran ideologi masih kontroversial. Misalnya, mereka yang menyukai partisipasi politik online diasosiasikan dengan ideologi politik konservatif (Šerek & Machackova, 2014). Temuan ini berbeda dengan kesimpulan Best & Krueger yang menunjukkan bahwa partisipasi online dikaitkan dengan ideologi liberal moderat (Best & Krueger, 2005). Dalam konteks WVS VII, orientasi ideologi menganut dikotomi Kiri (sosialisme) dan Kanan (liberalisme). Responden akan berada pada kelompok Kanan jika mereka setuju dengan nilai-nilai yang terkandung dalam liberalisme, seperti persaingan, peningkatan kepemilikan sektor swasta dalam dunia usaha dan industri, serta kerja keras. Sebaliknya, responden berhaluan Kiri jika menyetujui pemerataan pendapatan, peningkatan peran pemerintah dalam kehidupan perekonomian, dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan setiap orang.

Sejak Reformasi tahun 1998, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal yang bercirikan sistem multi partai, pemilihan pejabat eksekutif melalui pemilihan umum, kebebasan pers, netralitas militer dalam ranah politik, dan lain sebagainya. Nilai-nilai liberalisme juga memukul sektor perekonomian nasional. Keadaan ini menyebabkan masyarakat Indonesia semakin akrab dengan nilai-nilai liberalisme. Karena petisi digital merupakan bagian dari kebiasaan dalam sistem demokrasi liberal, maka peneliti berharap responden yang memiliki orientasi liberalisme (X14) akan berhubungan positif dengan partisipasi warga dalam petisi digital (H6).

2.6. Kelas Sosial dan Partisipasi Petisi Digital

Disiplin sosiologi telah lama mengidentifikasi masyarakat sebagai entitas yang tidak homogen. Di sisi lain, masyarakat adalah kumpulan individu dan kelompok yang membentuk suatu stratifikasi sosial tertentu. Landasan terbentuknya lapisan sosial bisa sangat beragam, mulai dari segi ekonomi (misalnya miskin vs kaya), sosial (misalnya bekerja vs tidak bekerja), kesehatan (misalnya sakit vs sehat), dan sebagainya. Kedudukan kelas sosial seseorang akan sangat mempengaruhi interaksi dan perilakunya. Tidak mengherankan, para ahli teori telah lama menganggap kelas sosial sebagai prediktor perilaku pemilih (Lewis-Beck et al., 2008).

WVS VII mengeksplorasi persepsi subjektif responden terhadap kedudukannya dalam stratifikasi sosial dalam masyarakat, yang terbagi dalam lima kelompok: kelas atas, kelas menengah atas, kelas menengah bawah, kelas pekerja, dan kelas bawah. Kelima kategori ini kemudian dibagi menjadi kelas menengah atas dan kelas menengah bawah. Secara sederhana, kelas menengah adalah antara si kaya dan si miskin. Mereka berpendidikan, dan sebagian besar bekerja di sektor swasta (Bonham, 1952). Beberapa penelitian menunjukkan bagaimana identitas kelas menengah sangat mempengaruhi perilaku politik pemilih. Di Indonesia, khususnya pada Pilpres 2014, Prabowo dinilai didukung oleh elite politik dan kelas menengah, sedangkan Jokowi didukung oleh kelas menengah ke bawah (Pepinsky, 2017).

Dalam konteks petisi digital, peran kelas sosial dalam petisi digital adalah mereka yang berpartisipasi dalam petisi konvensional cenderung berusia lebih tua, kurang berpendidikan, berafiliasi dengan pihak tertentu, dan termasuk dalam kelompok miskin (Lee et al., 2014). Sebaliknya, mereka yang berkategori punya dan belum pernah mengikuti petisi konvensional, lebih cenderung mengikuti petisi digital. Temuan ini juga dikuatkan oleh Yates & Lockley, yang mengatakan bahwa bentuk penggunaan media sosial berhubungan dengan atribut sosial ekonomi dan status kelas sosial (Yates & Lockley, 2018). Narasi ini menjadi dasar bagi peneliti untuk memperkirakan kelas sosial (X6) berhubungan positif dengan partisipasi warga dalam petisi digital (H7).

2.7. Variable Sosio-Demografis dan Partisipasi Petisi Digital

Faktor sosio-demografis telah lama dianggap oleh para ilmuwan sebagai prediktor perilaku pemilih (Carreras et al., 2014). Dalam konteks partisipasi elektronik, laki-laki lebih bersedia berpartisipasi dibandingkan perempuan (Stockemer, 2014). Penelitian lain menunjukkan bahwa partisipasi elektronik dipengaruhi oleh tingkat pendidikan (Gibson & McAllister, 2013), status sosial ekonomi (Best & Krueger, 2005), dan lokasi tempat tinggal (Isaksson, 2014). Temuan para peneliti ini bertentangan dengan hasil penelitian Šerek & Machackova, yang menegaskan bahwa faktor sosio-demografis tidak berkontribusi signifikan terhadap partisipasi online (Šerek & Machackova, 2014). Perdebatan ini menjadi dasar peneliti untuk merumuskan hipotesis terkait pengaruh faktor sosio-demografi terhadap partisipasi responden dalam petisi digital sebagai berikut: (a) laki-laki berhubungan positif dengan partisipasi dalam petisi digital (H8); (b) responden muda berhubungan positif dengan partisipasi dalam petisi digital (H9); (c) responden yang menikah berhubungan positif dengan partisipasi petisi digital (H10); (d) responden dengan pendidikan >SMA/ sederajat mempunyai hubungan positif dengan partisipasi petisi digital (H11); (e) responden yang bekerja berhubungan positif dengan partisipasi petisi digital (H12); (f) responden yang beragama Islam memiliki asosiasi positif terhadap partisipasi petisi digital (H13); dan (g) responden yang tinggal di perkotaan mempunyai hubungan positif dengan partisipasi petisi digital (H14).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan statistik antara variabel independen dan dependen. Sumber data sekunder berasal dari hasil WVS VII, yaitu survei longitudinal yang diselenggarakan oleh World Values Survey Association (WVSA) sejak tahun 1981. Indonesia baru saja dimasukkan sebagai salah satu lokasi penelitian WVS di WVS VII, dengan jumlah penduduk Indonesia yang berusia 3.000 orang lebih dari 18 dipilih secara acak. Proses pengumpulan data lapangan WVS VII dilakukan pada tahun 2017 – 2021 di 60 negara (Haerpfer et al., n.d.). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah partisipasi warga dalam petisi online/digital (Y), yang didefinisikan sebagai

keterlibatan warga dalam menandatangani petisi online. Variabel Y diambil dari kuesioner WVS VII, khususnya item pertanyaan Q209: "Apakah Anda pernah, mungkin, atau tidak pernah/tidak mungkin berpartisipasi dalam penandatanganan petisi online/digital?". Jawaban responden akan diubah menjadi variabel biner: ya (berkode 1) dan tidak pernah (berkode 0).

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari 14 variabel: jenis kelamin (X_1), umur (X_2), status perkawinan (X_3), tingkat pendidikan (X_4), status pekerjaan (X_5), kelas sosial (X_6), agama (X_7), tempat tinggal (X_8), kepercayaan terhadap masyarakat (X_9), kepercayaan terhadap lembaga pemerintah (X_{10}), kepercayaan terhadap parlemen (X_{11}), religiusitas (X_{12}), tingkat kebahagiaan (X_{13}), dan orientasi ideologi (X_{14}). Definisi konseptual dan operasional variabel independen ditunjukkan pada **Tabel 1**. Data dianalisis dengan regresi logistik menggunakan STATA 15 dengan tiga tahap sebagai berikut: analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat. Setelah dilakukan analisis bivariat menggunakan tabulasi silang, hanya variabel independen dengan $p < 0,25$ yang akan dimasukkan dalam analisis multivariat (Hosmer et al., 2013). Pada analisis multivariat peneliti menggunakan metode Enter.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Indikator
Partisipasi warga dalam petisi digital (Y)	1 = Ya; 0 = Tidak
Jenis Kelamin (X_1)	1 = Laki-laki; 0 = Perempuan
Usia (X_2)	1 = Muda; 0 = Tua
Status perkawinan (X_3)	1 = Menikah; 0 = Belum Menikah
Tingkat Pendidikan (X_4)	1 = >SMA; 0 = < SMA
Status pekerjaan (X_5)	1 = Bekerja; 0 = Tidak Bekerja
Kelas sosial (X_6)	1 = Kelas Menengah; 0 = Bukan Kelas Menengah
Agama (X_7)	1 = Islam; 0 = Bukan Islam
Tipe tempat tinggal (X_8)	1 = Perkotaan; 0 = Pedesaan
Kepercayaan pada masyarakat (X_9)	1 = Percaya; 0 = Tidak Percaya
Kepercayaan terhadap institusi pemerintah (X_{10})	1 = Percaya; 0 = Tidak Percaya
Kepercayaan pada parlemen (X_{11})	1 = Percaya; 0 = Tidak Percaya
Religiusitas (X_{12})	1 = Religius; 0 = Tidak Religius
Tingkat kebahagiaan (X_{13})	1 = Bahagia; 0 = Tidak Bahagia
Orientasi ideologi (X_{14})	1 = Liberalisme; 0 = Sosialisme

4. Hasil Penelitian

Bagian ini menunjukkan temuan penelitian. Penulis memulai dengan uraian singkat tentang Indonesia sebagai latar belakang, kontekstual *setting*, atau lokasi penelitian WVS VII. Selanjutnya penulis menunjukkan gambaran umum responden WVS VII di Indonesia dan hasil analisis univariat, bivariat, dan multivariat.

4.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki 17.508 pulau dengan luas total 1.904.569 km². Secara astronomis, Indonesia terletak antara 60°04'30" Lintang

Utara dan 110°00'36" Lintang Selatan serta antara 940°58'21" hingga 1410°01'10" Bujur Timur dan dilewati oleh garis khatulistiwa. atau garis khatulistiwa terletak pada garis lintang 00. Kepulauan Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta diapit oleh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 268,1 juta jiwa yang tersebar di 34 provinsi atau 511 kabupaten/kota, 7.217 kecamatan, dan 83.344 desa/kelurahan. Laju pertumbuhan penduduknya mencapai 1,15 persen. Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 mencapai 25,1 juta jiwa atau 9,4 persen. Indonesia memiliki skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,9 persen. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 67,5 persen, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3 persen (Badan Pusat Statistik, 2021).

4.2. Responden Penelitian

Total responden WVS VII di Indonesia sebanyak 3.200 orang. Dari jumlah tersebut, jumlah responden laki-laki (45,19%) lebih sedikit dibandingkan responden perempuan (54,81%). Responden banyak yang sudah menikah (76,66%), dan yang belum menikah hanya mencapai 23,34%. Responden yang berpendidikan <SMA/ sederajat mencapai 89,90%, dan yang berpendidikan >SMA/ sederajat hanya 10,10%. Responden yang bekerja sebanyak 75,21% dan hanya 24,79% yang tidak bekerja. Sebagian besar responden berasal dari kelas sosial “menengah ke bawah” (86,49%). Sedangkan kelompok sosial “menengah ke atas” hanya berjumlah 13,51% responden.

Sebagian besar responden beragama Islam (83,19%). Yang non muslim hanya 16,81%. Sebagian besar responden berdomisili di perdesaan (74,06%), dan hanya 25,94% yang berdomisili di perkotaan. Banyak responden (94,81%) yang menilai masyarakat kurang dapat dipercaya. Sebaliknya, yang menilai organisasi pemerintah dapat dipercaya sebanyak 79,34%. Sedangkan pendapat responden mengenai kepercayaan relatif berimbang (dapat dipercaya: 49,98% dan kurang dapat diandalkan: 50,02%). Sebagian besar responden menganggap dirinya religius (92,56%) dan bahagia (93,90%). Namun proporsi responden yang cenderung menganut ideologi liberalisme (56,19%) dan sosialisme (43,81%) relatif merata karena selisih proporsinya tidak terlalu besar.

4.3. Analisis Univariat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah partisipasi warga dalam petisi online (Y). Dari 3.183 responden, hanya 914 (28,72%) yang menyatakan pernah atau mungkin menandatangani petisi digital. Sisanya sebanyak 2.269 (71,28%) belum atau tidak akan menandatangani petisi digital. Empat belas variabel independen teridentifikasi sebagai kontributor terhadap variabel dependen (Y). Rangkuman analisis univariat variabel independen disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Analisis Univariat

No.	Variabel Bebas (X)	Jumlah (%)	Sampel (n)
1	Jenis Kelamin (X ₁)		
	<i>Laki-laki</i>	1,446 (45.19%)	3.200
	<i>Perempuan</i>	1,754 (54.81%)	
2	Usia (X ₂)		
	<i>Tua</i>	1,449 (45.28%)	3.200
	<i>Muda</i>	1,751 (54.72%)	

No.	Variabel Bebas (X)	Jumlah (%)	Sampel (n)
3	Status perkawinan (X ₃)		
	Belum Menikah	747 (23,34%)	3,200
	Menikah	2.453 (76,66%)	
4	Tingkat Pendidikan (X ₄)		
	<SMA/ sederajat	2.876 (89,90%)	3,199
	>SMA/ sederajat	323 (10,10%)	
5	Status pekerjaan (X ₅)		
	Belum Bekerja	787 (24,79%)	3,175
	Bekerja	2.388 (75,21%)	
6	Kelas Sosial (X ₆)		
	Bukan Kelas Menengah	2.708 (86,49%)	3,131
	Kelas Menengah	423 (13,51%)	
7	Religion (X ₇)		
	Islam	2.662 (83,19%)	3,200
	Bukan Islam	538 (16,81%)	
8.	Tipe tempat tinggal (X ₈)		
	Pedesaan	2.367 (74,06%)	3.196
	Perkotaan	829 (25,94%)	
9.	Kepercayaan pada masyarakat (X ₉)		
	Tidak Percaya	3.033 (94,81%)	3,199
	Percaya	166 (5,19%)	
10.	Kepercayaan pada pemerintah (X ₁₀)		
	Tidak Percaya	658 (20,66%)	3,185
	Percaya	2.527 (79,34%)	
11.	Kepercayaan pada parlemen (X ₁₁)		
	Tidak Percaya	1.584 (50,02%)	3,167
	Percaya	1.583 (49,98%)	
12.	Religiusitas (X ₁₂)		
	Tidak Religius	235 (7,44%)	3,159
	Religius	2.924 (92,56%)	
13.	Tingkat kebahagiaan (X ₁₃)		
	Tidak Bahagia	195 (6,10%)	3,199
	Bahagia	3.004 (93,90%)	
14.	Orientasi ideologi (X ₁₄)		
	Liberalisme	1.798 (56,19%)	3,200
	Sosialisme	1.402 (43,81%)	

4.4. Analisis Bivariat

Tabulasi silang digunakan untuk menganalisis hubungan statistik antara X dan Y. Hasil analisis dua variabel akan menentukan apakah suatu variabel independen akan dimasukkan dalam analisis multivariat atau tidak pada tahap selanjutnya. Hanya variabel independen yang memiliki $p < 0,25$ yang akan dimasukkan dalam analisis multivariat. Seperti terlihat pada **Tabel 4**, dari empat belas variabel independen, hanya sebelas variabel independen yang dapat dimasukkan dalam analisis multivariat. Tiga variabel tidak mempunyai hubungan signifikan

terhadap Y: X_{13} , X_9 , dan X_7 . Dari sebelas variabel tersebut, ada tiga variabel yang dimasukkan karena mempunyai $p < 0,25$. Sedangkan sisanya merupakan variabel independen yang memiliki hubungan signifikan secara statistik dengan Y. **Tabel 3** telah diurutkan berdasarkan skor X_2 . Variabel independen yang mempunyai X_2 terbesar akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam regresi logistik. Nomor urut variabel independen pada **Tabel 3** menunjukkan urutan pemasukan variabel independen dalam regresi logistik berbasis.

Tabel 3. Ringkasan Analisis Bivariat

No.	Variabel Bebas (X)	Variabel Terikat (Y)	X^2	DF	p	V
1.	Usia (X_2)	Partisipasi warga dalam petisi digital (Y)	80,82	1 (3,84)	0,01	0,15
2.	Religiusitas (X_{12})	Partisipasi warga dalam petisi digital (Y)	33,83	1 (3,84)	0,01	-0,10
3.	Orientasi ideologi (X_{14})	Partisipasi warga dalam petisi digital (Y)	26,70	1 (3,84)	0,01	0,09
4.	Jenis Kelamin (X_1)	Partisipasi warga dalam petisi digital (Y)	24,20	1 (3,84)	0,01	0,08
5.	Tingkat Pendidikan (X_4)	Partisipasi warga dalam petisi digital (Y)	16,75	1 (3,84)	0,01	0,07
6.	Kepercayaan pada institusi pemerintah (X_{10})	Partisipasi warga dalam petisi digital (Y)	14,23	1 (3,84)	0,01	-0,06
7.	Status Perkawinan (X_3)	Partisipasi warga dalam petisi digital (Y)	11,32	1 (3,84)	0,01	-0,05
8.	Kepercayaan pada parlemen (X_{11})	Partisipasi warga dalam petisi digital (Y)	6,00	1 (3,84)	0,01	-0,04
9.	Kelas sosial (X_6)	Partisipasi warga dalam petisi digital (Y)	3,04	1 (3,84)	0,08	0,03
10.	Tipe tempat tinggal (X_8)	Partisipasi warga dalam petisi digital (Y)	2,64	1 (3,84)	0,10	0,02
11.	Status pekerjaan (X_5)	Partisipasi warga dalam petisi digital (Y)	2,57	1 (3,84)	0,10	0,02
12.	Tingkat kebahagiaan (X_{13})	Partisipasi warga dalam petisi digital (Y)	0,53	1 (3,84)	0,46	0,01
13.	Kepercayaan pada masyarakat (X_9)	Partisipasi warga dalam petisi digital (Y)	0,40	1 (3,84)	0,52	0,01
14.	Agama (X_7)	Partisipasi warga dalam petisi digital (Y)	0,26	1 (3,84)	0,60	0,00

4.5. Analisis Multivariat

Analisis multivariat dilakukan dalam sebelas tahap. Dari sebelas variabel bebas yang dianggap sebagai faktor Y, hanya tujuh variabel bebas yang mempengaruhi Y secara signifikan. Regresi logistik akhir memuat tujuh variabel bebas dan menjelaskan Y secara signifikan sebesar 4,52%, X_2 (7) = 169,60, $p < 0,01$. Empat dari tujuh variabel independen mempunyai hubungan positif (X_2 , X_{14} , X_1 , dan X_4) dan dapat menjelaskan Y sebesar 195%, 145%, 156%, dan 143% secara signifikan, $p < 0,01$. Tiga variabel independen lainnya (X_{12} , X_{10} , dan X_3) mempunyai hubungan

negatif signifikan, $p < 0,10$, dan dapat menjelaskan Y masing-masing sebesar 63%, 76%, dan 80%. Seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 4**, semua variabel independen signifikan pada tingkat $p < 0,01$. Hanya status perkawinan (X_3) yang signifikan pada $p < 0,05$. Model terakhir menghasilkan karakteristik responden yang dapat berpartisipasi dalam petisi digital: muda, tidak beragama, berideologi liberal, berjenis kelamin laki-laki, berpendidikan >SMA/ sederajat, tidak percaya pada organisasi pemerintah, dan belum menikah. Model akhir yang dihasilkan penelitian ini sesuai dengan data lapangan. Hal ini ditunjukkan dengan X_2 hitung (186,75) lebih kecil dibandingkan X_2 (190,52) pada taraf signifikansi 0,05, derajat kebebasan sebesar 60, dan $p > 0,05$.

Tabel 4. Model Logistik Akhir

Variabel Bebas (X)	Variabel Terikat (Y)
Usia (X_2)	0,670*** (0,0859)
Religiusitas (X_{12})	-0,462*** (0,145)
Orientasi ideologi (X_{14})	0,377*** (0,0838)
Jenis Kelamin (X_1)	0,450*** (0,0825)
Tingkat Pendidikan (X_4)	0,362*** (0,127)
Kepercayaan pada institusi pemerintah (X_{10})	-0,266*** (0,0977)
Status perkawinan (X_3)	-0,214** (0,0948)
Konstan	-0,983*** (0,200)
Pengamatan	3.128

Kesalahan standar dalam tanda kurung

*** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$

5. Pembahasan

Dalam analisis bivariat, ada tiga variabel independen yang tidak dapat dimasukkan dalam analisis multivariat: tingkat kebahagiaan (X_{13}), kepercayaan terhadap masyarakat (X_9), dan agama (X_7). Otomatis temuan ini menolak H_1 , H_9 , dan H_{13} . Temuan ini juga bertentangan dengan penelitian: (a) Naranjo-Zolotov et al. menyimpulkan bahwa modal sosial mempengaruhi proses adopsi partisipasi elektronik (Naranjo-Zolotov et al., 2019); (b) Ward menyimpulkan bahwa kebahagiaan merupakan prediktor kuat terhadap partisipasi pemilih dan hasil pemilu (Ward, 2020); dan (c) Shadiqi et al. menemukan bahwa kesamaan identitas agama memicu solidaritas dan alasan penandatanganan petisi digital (Shadiqi et al., 2020).

Dalam analisis multivariat, beberapa variabel independen harus dikeluarkan dari model regresi logistik akhir karena memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap Y . Variabel

tersebut adalah X_{11} (kepercayaan terhadap parlemen), X_6 (kelas sosial), dan X_8 (tipe tempat tinggal). Hasil tersebut menjadi dasar peneliti untuk menolak H_3 , H_7 , dan H_{14} . Temuan ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan adanya keterkaitan antara kelas sosial (Lee et al., 2014; Lewis-Beck et al., 2008; Pepinsky, 2017; Yates & Lockley, 2018), modal sosial (de Zúñiga et al., 2017; Naranjo-Zolotov et al., 2019; Panagiotopoulos et al., 2011), dan lokasi tempat tinggal dengan partisipasi politik (Isaksson, 2014).

Mengapa kepercayaan terhadap parlemen (X_{11}) tidak berhubungan signifikan dengan Y ? Idealnya, ketika masyarakat tidak mempercayai parlemen karena berbagai alasan, mereka akan mencari saluran lain untuk menyalurkan ekspresi politiknya, seperti petisi digital. Namun argumen tersebut tidak didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap parlemen tidak berhubungan secara statistik dengan Y . Dengan kata lain, partisipasi dalam petisi digital tidak bergantung pada kepercayaan terhadap parlemen.

Kelas sosial (X_6) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Y . Dalam penelitian ini kelas sosial merupakan persepsi subjektif responden terhadap kedudukan sosialnya, apakah termasuk dalam kelompok kelas menengah (kode 1) atau tidak pada kelas menengah (kode 0). Temuan ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan adanya hubungan signifikan antara kelas sosial dan partisipasi politik (Lee et al., 2014; Lewis-Beck et al., 2008; Pepinsky, 2017; Yates & Lockley, 2018). Peneliti menduga hal ini disebabkan oleh (a) bias responden pada data WVS VII yang hanya melibatkan 13,51% responden kelas menengah dan 86,49% responden kelas menengah bawah; (b) pemerintah Indonesia belum secara resmi mengadopsi petisi digital sebagai saluran politik, sehingga belum terlalu populer di kalangan kelas menengah; dan (c) adanya permasalahan serius di kalangan kelas menengah di Indonesia pada era Orde Reformasi. Namun hilangnya pengaruh kelas sosial terhadap partisipasi warga dalam petisi digital nampaknya memperkuat argumen Mujani & Liddle mengenai semakin berkurangnya pengaruh kelas sosial dalam mempengaruhi perilaku politik warga di Indonesia saat ini (Mujani & Liddle, 2010).

Tipe tempat tinggal (X_8) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Y . Pada analisis konvensional, X_8 berpengaruh terhadap partisipasi politik karena wilayah perkotaan memiliki akses informasi politik yang relatif lebih baik. Di era internet, penjelasan seperti ini menjadi tidak relevan karena media konvensional semakin ditinggalkan oleh masyarakat yang lebih banyak mengonsumsi berita politik melalui ponsel pintar. Artinya, sangat logis jika tipe tempat tinggal tidak mempengaruhi Y .

Selanjutnya, hanya tujuh variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap Y : X_2 (usia), X_{14} (orientasi ideologi), X_1 (gender), X_4 (tingkat pendidikan), X_{12} (religiusitas), X_{10} (kepercayaan terhadap organisasi pemerintah), dan X_3 (status perkawinan). Variabel-variabel tersebut menghasilkan karakteristik responden yang memiliki probabilitas tinggi untuk berpartisipasi dalam petisi digital: berusia muda, berideologi liberal, berjenis kelamin laki-laki, berpendidikan >SMA, beragama, percaya pada lembaga pemerintah, dan menikah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam petisi digital. Temuan ini bertentangan dengan argumen Best & Krueger yang menunjukkan sebaliknya (Best & Krueger, 2005). Menurut Best & Krueger, tingkat keterlibatan/partisipasi politik generasi muda jauh lebih rendah dibandingkan generasi tua, padahal mereka memiliki kompetensi individu yang lebih baik dibandingkan generasi tua dalam menggunakan berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi (Best & Krueger, 2005). Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan faktor motivasi antara generasi muda dan generasi tua. Hasil penelitian tersebut juga membantah temuan Prihartini yang menunjukkan bahwa generasi muda kurang melek politik (Prihartini, 2018). Namun, temuan

kami sejalan dengan Lee et al. di Taiwan (Lee et al., 2014) dan Stockemer di tingkat global (menggunakan data WVS VII) (Stockemer, 2014).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa responden laki-laki memiliki probabilitas 156% untuk berpartisipasi dalam petisi digital, $p < 0,01$. Hasil ini bertentangan dengan temuan Stockemer yang menunjukkan bahwa responden laki-laki, jika dibandingkan dengan responden perempuan, lebih memilih untuk berpartisipasi dalam demonstrasi dan boikot dibandingkan berpartisipasi dalam petisi digital (Stockemer, 2014). Temuan ini memperkuat argumen klasik Verba yang mengatakan bahwa perempuan kurang tertarik mendapatkan informasi tentang politik (Verba et al., 1997).

Selain itu, tingkat pendidikan juga sangat meyakinkan mempengaruhi partisipasi warga dalam petisi digital. Temuan ini memperkuat argumen Flanagan yang mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin lama pengalaman seseorang dalam sosialisasi politik, dan semakin tinggi pula kualitas pemahaman seseorang terhadap konsep kontrak sosial yang mengikat masyarakat secara imajiner (Flanagan, 2003). Pentingnya variabel pendidikan juga sejalan dengan temuan Gibson & McAllister di Australia mengenai partisipasi politik warga negara di internet (Gibson & McAllister, 2013).

Signifikansi ideologi dan religiusitas dalam mempengaruhi partisipasi warga dalam petisi digital menguatkan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh ideologi (Best & Krueger, 2005; Šerek & Machackova, 2014) dan religiusitas (Emmenegger & Manow, 2014; Greenberg, 2008; Heath et al., 2015; Shadiqi et al., 2020) dalam mempengaruhi partisipasi politik. Terakhir, signifikansi kepercayaan terhadap organisasi pemerintah dan status perkawinan terhadap partisipasi politik sejalan dengan penelitian sebelumnya (de Zúñiga et al., 2017; Naranjo-Zolotov et al., 2019; Panagiotopoulos et al., 2011; Putra, 2017).

6. Kesimpulan

Dari empat belas variabel independen yang diidentifikasi sebagai faktor partisipasi warga dalam menandatangani petisi digital, hanya tujuh variabel independen yang memiliki hubungan signifikan terhadap Y. Empat variabel memiliki hubungan positif, dan tiga variabel independen memiliki hubungan negatif signifikan. Semua variabel independen signifikan pada $p < 0,01$. Hanya status perkawinan yang signifikan pada $p < 0,05$. Model akhir ini menghasilkan karakteristik responden yang dapat berpartisipasi dalam petisi digital: berusia muda, tidak beragama, berideologi liberalisme, berjenis kelamin laki-laki, berpendidikan >SMA/ sederajat, tidak percaya pada organisasi pemerintah, dan belum menikah.

Di antara tujuh variabel independen yang secara signifikan mempengaruhi partisipasi warga dalam petisi digital, ada empat variabel yang dapat dipertimbangkan: religiusitas, ideologi, tingkat pendidikan, dan kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Sedangkan tiga variabel lainnya merupakan atribut sosio-demografi responden. Artinya, pemerintah dan pihak-pihak yang peduli terhadap petisi digital perlu meningkatkan religiusitas warga, meningkatkan kuantitas, akses, dan kualitas jenjang pendidikan dan pendidikan ideologi, serta menjaga kepercayaan warga terhadap organisasi pemerintah.

Tingkat penetrasi internet di tanah air yang terus meningkat dari tahun ke tahun mendorong penelitian ini untuk merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk mengadopsi secara formal mekanisme petisi digital sebagai saluran resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politiknya. Langkah ini akan

mendorong optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara.

7. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sriwijaya yang mendanai sepenuhnya penelitian ini berdasarkan kontrak nomor 0010/UN9/SK.LP2M.PT/2121.

8. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Anduiza, E., Gallego, A., & Cantijoch, M. (2010). Online political participation in Spain: The impact of traditional and internet resources. *Journal of Information Technology and Politics*, 7(4), 356–368. <https://doi.org/10.1080/19331681003791891>
- Anonymous, A. (2021a). *Petition*. Oxford Learners Dictionaries.
- Anonymous, A. (2021b). *Petitions*. www.Parliament.Uk.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Indonesia 2021*. BPS Statistic Indonesia.
- Best, S. J., & Krueger, B. S. (2005). Analyzing the representativeness of internet political participation. *Political Behavior*, 27(2), 183–216. <https://doi.org/10.1007/s11109-005-3242-y>
- Bochel, C., & Bochel, H. (2017). 'Reaching in'? The potential for e-petitions in local government in the United Kingdom. *Information Communication and Society*, 20(5), 683–699. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1203455>
- Bonham, J. (1952). Two Studies in the Middle Class Vote: I--The Middle Class Elector. *The British Journal of Sociology*, 3(3), 222. <https://doi.org/10.2307/586809>
- Carreras, M., Castañeda-Angarita, N., & America, L. (2014). Who Votes in Latin America? A Test of Three Theoretical Perspectives. *Comparative Political Studies*, 47(478), 1079–1104. <https://doi.org/10.1177/0010414013488558>
- Chan, R. C. H., Mak, W. W. S., Chan, W.-Y., & Lin, W.-Y. (2020). Effects of Social Movement Participation on Political Efficacy and Well-Being: A Longitudinal Study of Civically Engaged Youth. *Journal of Happiness Studies*. <https://doi.org/10.1007/s10902-020-00303-y>
- Clark, S. D., & Lomax, N. (2020). Linguistic and semantic factors in government e-petitions: A comparison between the United Kingdom and the United States of America. *Government Information Quarterly*, 37(4), 101523. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101523>
- Clark, S. D., Morris, M. A., & Lomax, N. (2018). Estimating the outcome of UKs referendum on EU membership using e-petition data and machine learning algorithms. *Journal of Information Technology and Politics*, 15(4), 344–357. <https://doi.org/10.1080/19331681.2018.1491926>
- Dai, X., & Norton, P. (2007). Parliamentary democracy online: Lessons from Europe. *Journal of Legislative Studies*, 13(3), 477–482. <https://doi.org/10.1080/13572330701500946>
- de Vreese, C. H., & Boomgaarden, H. (2006). News, political knowledge and participation: The differential effects of news media exposure on political knowledge and participation. *Acta Politica*, 41(4), 317–341. <https://doi.org/10.1057/palgrave.ap.5500164>
- de Zúñiga, H. G., Barnidge, M., & Scherman, A. (2017). Social Media Social Capital, Offline

- Social Capital, and Citizenship: Exploring Asymmetrical Social Capital Effects. *Political Communication*, 34(1), 44–68. <https://doi.org/10.1080/10584609.2016.1227000>
- Dimitrova, D. V., Shehata, A., Strömbäck, J., & Nord, L. W. (2014). The Effects of Digital Media on Political Knowledge and Participation in Election Campaigns: Evidence From Panel Data. *Communication Research*, 41(1), 95–118. <https://doi.org/10.1177/0093650211426004>
- Dolata, U., & Schrape, J. F. (2016). Masses, Crowds, Communities, Movements: Collective Action in the Internet Age. *Social Movement Studies*, 15(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/14742837.2015.1055722>
- Elnoshokaty, A. S., Deng, S., & Kwak, D.-H. (2016). Success Factors of Online Petitions: Evidence from Change.org. 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 1979–1985. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.249>
- Emmenegger, P., & Manow, P. (2014). Religion and the Gender Vote Gap: Women's Changed Political Preferences from the 1970s to 2010. *Politics and Society*, 42(2), 166–193. <https://doi.org/10.1177/0032329213519419>
- Flanagan, C. (2003). Developmental Roots of Political Engagement. *Political Science and Politics*, 36(02), 257–261. <https://doi.org/10.1017/S104909650300218X>
- Fukuyama, F. (1997). *Social Capital*. Brasenose College.
- George, J. J., & Leidner, D. E. (2019). From clicktivism to hacktivism: Understanding digital activism. *Information and Organization*, 29(3), 100249. <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2019.04.001>
- Gibson, R. K., & McAllister, I. (2013). Online Social Ties and Political Engagement. *Journal of Information Technology & Politics*, 10(1), 21–34. <https://doi.org/10.1080/19331681.2012.712461>
- Graham, G. (2004). *Eight theories of ethics*. Routledge.
- Greenberg, A. (2008). Race, Religiosity, and the Women's Vote Race. *Women & Politics*, 22(3), 59–82. <https://doi.org/10.1300/J014v22n03>
- Haerpfer, C., Inglehart, R., Moreno, A., Welzel, C., Kizilova, K., Diez-Medrano, J., Lagos, M., Norris, P., Ponarin, E., & Puranen, B. (n.d.). *World Values Survey Wave 7 (2017-2020) Cross-National Dataset*. <https://doi.org/10.14281/18241.13>
- Hagen, L. (2018). Content analysis of e-petitions with topic modeling: How to train and evaluate LDA models? *Information Processing and Management*, 54(6), 1292–1307. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2018.05.006>
- Hagen, L., Harrison, T. M., Uzuner, Ö., May, W., Fake, T., & Katragadda, S. (2016). E-petition popularity: Do linguistic and semantic factors matter? *Government Information Quarterly*, 33(4), 783–795. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.07.006>
- Halupka, M. (2014). Clicktivism: A systematic heuristic. *Policy and Internet*, 6(2), 115–132. <https://doi.org/10.1002/1944-2866.POI355>
- Harrison, T. M., Dumas, C., DePaula, N., Fake, T., May, W., Atrey, A., Lee, J., Rishi, L., & Ravi, S. S. (2021). Exploring E-petitioning and media: The case of #BringBackOurGirls. *Government Information Quarterly*, 101569. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101569>
- Heath, O., Verniers, G., & Kumar, S. (2015). Do Muslim voters prefer Muslim candidates? Co-religiosity and voting behaviour in India. *Electoral Studies*, 38, 10–18. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2015.01.005>
- Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). *Applied Logistic Regression*. John Wiley & Sons, Inc.
- Hough, R. (2012). Do Legislative Petitions Systems Enhance the Relationship between Parliament and Citizen? *Journal of Legislative Studies*, 18(3–4), 479–495.

<https://doi.org/10.1080/13572334.2012.706057>

- Inkeles, A. (2000). Measuring social capital and its consequences. *Policy Sciences*, 33(3/4), 245–268.
- International IDEA. (n.d.). *Regional Entity View*. Retrieved February 18, 2021, from <https://www.idea.int/data-tools/regional-entity-view/ASEAN/40>
- Isaksson, A. S. (2014). Political participation in Africa: The role of individual resources. *Electoral Studies*, 34, 244–260. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.09.008>
- Kaufhold, K., Valenzuela, S., & De Zúñiga, H. G. (2010). Citizen journalism and democracy: How user-generated news use relates to political knowledge and participation. *Journalism and Mass Communication Quarterly*, 87(3–4), 515–529. <https://doi.org/10.1177/107769901008700305>
- Koenig, H. G., Al Zaben, F., Khalifa, D. A., & Al Shohaib, S. (2015). Measures of Religiosity. In *Measures of Personality and Social Psychological Constructs* (pp. 530–561). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-386915-9.00019-X>
- Lee, C., Chen, D., & Huang, T. (2014). The Interplay Between Digital and Political Divides. *Social Science Computer Review*, 32(1), 37–55. <https://doi.org/10.1177/0894439313497470>
- Levi, M. (2015). Trust, Sociology of. In J. D. B. T.-I. E. of the S. & B. S. (Second E. Wright (Ed.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (pp. 664–667). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.32162-6>
- Lewis-Beck, M. S., Jacoby, W. G., Norpoth, H., & Weisberg, H. F. (2008). *The American Voter Revisited*. Michigan University Press.
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2010). Personalities, Parties, and Voters. *Journal of Democracy*, 21(2), 35–49. <https://doi.org/10.1353/jod.0.0160>
- Naranjo-Zolotov, M., Oliveira, T., Cruz-Jesus, F., Martins, J., Gonçalves, R., Branco, F., & Xavier, N. (2019). Examining social capital and individual motivators to explain the adoption of online citizen participation. *Future Generation Computer Systems*, 92, 302–311. <https://doi.org/10.1016/j.future.2018.09.044>
- Nekmat, E., Gower, K. K., Gonzenbach, W. J., & Flanagan, A. J. (2015). Source effects in the micro-mobilization of collective action via social media. *Information Communication and Society*, 18(9), 1076–1091. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1018301>
- Oni, A. A., Oni, S., Mbarika, V., & Ayo, C. K. (2017). Empirical study of user acceptance of online political participation: Integrating Civic Voluntarism Model and Theory of Reasoned Action. *Government Information Quarterly*, 34(2), 317–328. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.02.003>
- Panagiotopoulos, P., Sams, S., Elliman, T., & Fitzgerald, G. (2011). Do social networking groups support online petitions? *Transforming Government: People, Process and Policy*, 5(1), 20–31. <https://doi.org/10.1108/17506161111114626>
- Pepinsky, T. (2017). Southeast Asia: Voting against disorder. *Journal of Democracy*, 28(2), 120–131. <https://doi.org/10.1353/jod.2017.0029>
- Prihatini, E. S. (2018). Indonesian young voters: Political knowledge and electing women into parliament. *Women's Studies International Forum*, 70(June 2018), 46–52. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.07.015>
- Putnam, R. D. (2002). *Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society*. Oxford University Press.
- Putra, H. (2017). Determinants of Vote Buying in Local Head Election in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 9(2), 205–218. <https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.205-218>
- Ranchordás, S. (2017). Digital agoras: Democratic legitimacy, online participation and the case

- of Uber-petitions. *Theory and Practice of Legislation*, 5(1), 31–54. <https://doi.org/10.1080/20508840.2017.1279431>
- Šerek, J., & Machackova, H. (2014). Online only: Which Czech young adults prefer online civic participation? *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, 8(3). <https://doi.org/10.5817/CP2014-3-6>
- Shadiqi, M. A., Muluk, H., & Milla, M. N. (2020). Support for Palestinian among Indonesian Muslim: Religious identity and solidarity as reasons for e-petition signing. *Psychological Research on Urban Society*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/proust.v3i1.83>
- Sheppard, J. (2015). Online petitions in Australia: Information, opportunity and gender. *Australian Journal of Political Science*, 50(3), 480–495. <https://doi.org/10.1080/10361146.2015.1049512>
- Stockemer, D. (2014). What drives unconventional political participation? A two level study. *The Social Science Journal*, 51(2), 201–211. <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2013.10.012>
- Suh, J. H., Park, C. H., & Jeon, S. H. (2010). Applying text and data mining techniques to forecasting the trend of petitions filed to e-People. *Expert Systems with Applications*, 37(10), 7255–7268. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2010.04.002>
- Susha, I., & Grönlund, Å. (2014). Context clues for the stall of the Citizens' Initiative: Lessons for opening up e-participation development practice. *Government Information Quarterly*, 31(3), 454–465. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.02.005>
- Ulo, K. L. M., Hidayanto, A. N., Sandhyaduhita, P. I., Fitriani, W. R., Meyliana, M., & Abidin, Z. (2019). Factors influencing internet users' intention to sign e-petitions. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 13(3/4), 257–275. <https://doi.org/10.1108/TG-01-2019-0006>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.
- Verba, S., Burns, N., & Schlozman, K. L. (1997). Knowing and Caring about Politics: Gender and Political Engagement. *The Journal of Politics*, 59(4), 1051–1072. <https://doi.org/10.2307/2998592>
- Wang, Z., & Zhong, Y. (2020). What were residents' petitions in Beijing- based on text mining. *Journal of Urban Management*, 9(2), 228–237. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2019.11.006>
- Ward, G. (2020). Happiness and Voting: Evidence from Four Decades of Elections in Europe. *American Journal of Political Science*, 64(3), 504–518. <https://doi.org/10.1111/ajps.12492>
- Wright, S. (2012). Assessing (e-)Democratic Innovations: “Democratic Goods” and Downing Street E-Petitions. *Journal of Information Technology and Politics*, 9(4), 453–470. <https://doi.org/10.1080/19331681.2012.712820>
- Wright, S. (2015). Populism and Downing Street E-petitions: Connective Action, Hybridity, and the Changing Nature of Organizing. *Political Communication*, 32(3), 414–433. <https://doi.org/10.1080/10584609.2014.958256>
- Wright, S. (2016). ‘Success’ and online political participation: The case of Downing Street E-petitions. *Information Communication and Society*, 19(6), 843–857. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1080285>
- Yates, S., & Lockley, E. (2018). Social Media and Social Class. *American Behavioral Scientist*, 62(9), 1291–1316. <https://doi.org/10.1177/0002764218773821>

Tentang Penulis

1. **Dyah Hapsari Ekonugraheni**, memperoleh gelar Magister dari Universitas Sriwijaya, Indonesia, pada tahun 2008. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia. Ia mengajar beberapa mata kuliah: sosiologi politik, sosiologi komunikasi, pemberdayaan masyarakat, dan sosiologi konflik, dan penelitiannya berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga, partisipasi politik, dan studi gender.
E-Mail: dyahhapsari@fisip.unsri.ac.id
2. **Retna Mahriani**, memperoleh gelar Doktor dari Universitas Padjadjaran, Indonesia, pada tahun 2015. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia. Ia mengajar mata kuliah seperti teori komunikasi, komunikasi budaya, komunikasi politik, dan media baru. Bidang penelitian utamanya adalah komunikasi politik, digital, dan kesehatan.
E-Mail: retnamahriani@fisip.unsri.ac.id
3. **Yusnaini**, memperoleh gelar Magister dari Universitas Sriwijaya, Indonesia, pada tahun 2001. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia. Ia mengajar kelas tentang perubahan sosial, manajemen konflik, dan gerakan sosial serta berfokus pada kegiatan penelitian tentang perubahan sosial dan gerakan sosial.
E-Mail: yusnaini@fisip.unsri.ac.id